



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Agathis Telp./Fax (0552) 2033860 Tanjung Selor Kode Pos 77212 E-mail : dpu@kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : 600/ 037 /PUPR-PERKIM.SET/2022

TENTANG

**RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, perlu melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menggerakkan, melaksanakan dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. bahwa sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk disusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
- KESATU : Menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
- KEDUA : Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Tanjung Selor
Pada tanggal : 09 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas,

DR. DT. Iman Suramenggala, S.Hut.,M.Sc
NIP.19711224 200212 1 004
Pimpinan TK.I, IV/b

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2022

NO	Program dan Kegiatan	Output	Rencana Kerja	Rencana Aktivitas												Kriteria Keberhasilan	Pananggung Jawab
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN																	
1	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Reformasi Birokrasi	Membentuk Tim Reformasi Birokrasi														Tim Reformasi Birokrasi
2	Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														Tim PMPRB
3	Membentuk Tim Agen Perubahan	Surat Keputusan tentang Tim Agen Perubahan (Agent Of Change) Reformasi Birokrasi	Membentuk Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi														Agen Perubahan terbentuk dengan ketetapan formal
4	Penyusunan dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Menyusun Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi														Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Melakukan Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														Progres dari Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
6	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Nilai Total berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE)	Menilai dan mengumpulkan evidence Reformasi Birokrasi														Tim Assesor mencapai konsensus dalam penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
																	Tim PMPRB
II. PROGRAM DEREGULASI																	
1	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan yang terkelola secara efektif	Inventarisasi, analisa, dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan														Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan yang efektif
			Melakukan harmonisasi dan penyusunan regulasi														Tim PMPRB
			Melakukan FGD dan konsultasi publik dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan														Melakukan revisi Peraturan Perundang-undangan
			Melakukan revisi Peraturan Perundang-undangan														
III. PROGRAM ORGANISASI																	
1	Evaluasi Kelembagaan	Hasil Pemetaan Kelembagaan	Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan														Struktur Organisasi yang efektif dan efisien
																	Tim PMPRB
IV. PROGRAM TATA LAKSANA																	
1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Dokumen Standar Operasional Prosedur	Menyusun SOP														Tersusunnya SOP yang tepat
2	Penyusunan Standar Pelayanan	Dokumen Standar Pelayanan	Melakukan evaluasi terhadap SOP														Tim PMPRB
			Melakukan revisi dan penetapan SOP														Mengampulkan data tentang standar pelayanan
			Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan														Tersusunnya Standar Pelayanan yang tepat

V. PROGRAM SDM APARATUR

1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Dokumen Anjab	Menyusun Dokumen Anjab									SDM yang kompeten	
2	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen SKJ	Menyusun Standar Kompetensi Jabatan									Standar Kompetensi tiap jabatan	
3	Penyusunan Kebutuhan Diklat ASN	Data Kebutuhan Diklat ASN	Menyusun Kebutuhan Diklat Jabatan									Pengembangan Kompetensi telah diterapkan	
4	Penegakan Disiplin dan Kode Etik	Surat Keputusan tentang Disiplin dan Kode Etik	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan disiplin	Yellow	Disiplin dan Kode etik telah dilaksanakan								
5	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Data Kepegawaian	Menerapkan aturan disiplin/ kode etik										Tim PMPRB
VI. PROGRAM AKUNTABILITAS													
1	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Laporan hasil Pengelolaan Akuntabilitas	Meningkatkan Kapasitas SDM yang memangani akuntabilitas kinerja	Yellow	Sistem Pengukuran telah diterapkan								
VII. PROGRAM PENGAWAISAN													
1	Pengendalian Gratifikasi	Brosur / Pamlet anti gratifikasi, Laporan Pengendalian Gratifikasi	Melaksanakan penanganan gratifikasi	Yellow	Pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan								
2	Penanganan pengaduan masyarakat	Laporan pengaduan masyarakat	Menyampaikan LHKPN dan LHKASN	Yellow	Tim PMPRB								
VIII. PROGRAM PELAYANAN PUBLIK													
1	Penerapan Standar Pelayanan	Surat Keputusan tentang Standar Pelayanan	Menetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Yellow	Standar Pelayanan telah diterapkan dan dilaksanakan								
2	Penilaian Standar Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	Yellow	Indeks Kepuasan Masyarakat								
3	Permanfaatan Teknologi Informasi	Teknologi informasi telah diterapkan	Menerapkan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Yellow	Teknologi informasi memberikan manfaat pelayanan								
			Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi	Yellow	Tim PMPRB								

Plt. Kepala Dinas,


DR.DT. Iman Syamannengala, S.Hut, M.Sc
NIP 19711224 200212 1 004
Pemimpin TR.I, IV/b